

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Perkara Pidana

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata”²². Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi.

Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pembuktian antara lain sebagai berikut:

- a. R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²³ Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R.Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga

²² Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Hal. 229.

²³ R. Subekti, 2008. *Hukum Pembuktian*. Jakarta. Pradnya Paramita. Hlm.1.

dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.

b. M. Yahya Harahap

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.”²⁴

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa M.Yahya Harahap dalam memandang pembuktian lebih menitik beratkan pada aspek penyajian alat-alat bukti, apakah alat bukti yang diajukan sah menurut hukum atau tidak. Karena jika alat bukti yang diajukan tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam undang-undang, maka konsekuensinya adalah keabsahan dan nilai pembuktian yang diajukan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.

c. Anshoruddin dengan mengutip beberapa pendapat mengartikan pembuktian sebagai berikut:²⁵

- a) Menurut Muhammad at Thohir Muhammad ‘Adb al ‘Aziz, membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dari dalil hingga dapat menyakinkan orang lain.
- b) Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya hal yang

²⁴ M.Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 279

²⁵ Anshoruddin, 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hlm 25-26.

menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.

- c) Menurut J.C.T Simorangkir, pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan.

Dari uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembuktian menurut Anshoruddin ialah rangkaian keterangan atau alasan yang sehingga dengan keterangan atau alasan tersebut hakim menjadi yakin untuk memberikan atau menjatuhkan putusan.

- d. Sudikno Mertokusumo, membuktikan memiliki beberapa pengertian, yaitu:²⁶

- a) Dalam arti logis, membuktikan adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan;
- b) Dalam arti konvensional, pembuktian ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif; dan
- c) Dalam arti yuridis, membuktikan ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Jika menurut Anshoruddin pembuktian ialah rangkaian keterangan atau alasan untuk memperoleh keyakinan, maka berbeda dengan Sudikno Mertokusumo, Sudikno memandang pembuktian sebagai alat untuk memperoleh sebuah kepastian, baik itu kepastian yang bersifat nisbi/relative maupun kepastian yang bersifat mutlak.

²⁶ *Ibid.* Hlm. 27-28

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa kata dasar dari pembuktian adalah bukti, bukti dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal. Penjelasan tentang pembuktian apabila ditinjau dari kaca mata hukum, pembuktian adalah suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum didalam proses peradilan. Jadi Pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dimasukkannya pengertian pembuktian dalam tinjauan pustaka ini yaitu dengan maksud untuk memberikan gambaran umum, konsep dan batasan dalam memahami pembuktian yang akan dikaji dalam pembahasan penelitian ini.

2. Jenis-jenis Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Waluyadi, berpendapat bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu :

1. *Conviction-in Time* Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa ;
2. *Conviction-Raisonee* Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam

menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*) Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).
4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim.²⁷

²⁷ Waluyadi. 2004. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 39

Berdasarkan teori pembuktian yang diutarakan oleh waluyadi diatas dapat diketahui bahwa pembagian teori pembuktian terbagi dalam 4 jenis yaitu : *Conviction-in Time*, *Conviction-Raisonee*, *positief wettelijke stelsel* dan *negatief wettelijke stelsel* dari ke 4 (empat) jenis pembuktian tersebut yang paling sering digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau yang biasa disebut dengan *negatief wettelijke stelsel*.

Menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu :²⁸

- a) Pembukian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang ;
- b) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diartikan bahwa praktik pembuktian dalam proses peradilan yang diterapkan di Indonesia lebih cenderung pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, hal ini dikarenakan pada poses pemeriksaan di persidangan, hakim sering berpedoman pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Uraian teori pembuktian diatas sangat membantu dalam mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena

dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian secara lengkap dan detail. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan. Karena untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan, pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindakan penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan siapa yang menjadi pelaku atau tersangkanya.

Penjelasan mengenai pengertian pembuktian dan teori pembuktian dalam tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang apa yang dimaksud dengan pembuktian dalam konteks tindak pidana, siapa yang dapat dibebani pembuktian dalam mengungkap suatu tindak pidana, dan bagaimana pembuktian tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa telah terjadi atau tidak suatu tindak pidana, siapa yang menjadi

pelaku atau tersangkanya serta keterhubungannya dengan saksi mahkota dalam pembuktian suatu tindak pidana yang nantinya akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan secara sah dan meyakinkan.

3. Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Sebelum mengurai mengenai prinsip dalam pembuktian, penulis akan terlebih dahulu memaparkan mengenai konsep pembuktian, yaitu:²⁹

- a) Suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. Maksudnya adalah bukti tersebut berkaitan dengan fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran suatu peristiwa.
- b) Suatu bukti haruslah dapat diterima atau *admissible*. Biasanya suatu bukti yang diterima dengan sendirinya relevan. Namun demikian, dapat saja suatu bukti relevan tetapi tidak dapat diterima, contohnya *testimoni de auditu* atau *hearsay*.³⁰
- c) Tidak diakuinya suatu bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Terlebih dalam hukum pidana, kendatipun suatu bukti relevan dan dapat diterima dari sudut pandang penuntut umum, bukti tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim bilamana perolehan bukti tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan.
- d) Setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim. Disini hakim akan menilai mengenai kesesuaian bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan, yang mana kemudian akan dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan uraian konsep pembuktian diatas dapat diketahui bahwa melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

²⁹ Eddy O.S. Hiarij. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Yogyakarta. PT. Gelora Aksara Pratama. Hlm. 5

³⁰ *Testimoni de Audita* adalah mendengar kesaksian dari orang lain.

Kemudian mengenai prinsip-prinsip dalam pembuktian yaitu:

- a. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Prinsip ini terdapat pada pasal 184 ayat (2) KUHAP³¹. Prinsip ini dapat disebut dengan istilah *notoire feiten* atau fakta notoir. Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi dua golongan, yaitu: 1) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. 2) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.

- b. Menjadi saksi adalah kewajiban

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP, yaitu :

“Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.”

- c. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)

Prinsip ini terdapat pada pasal 185 ayat (2) KUHAP, yaitu:

“ keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”

Berdasarkan prinsip ini maka apabila hanya ada satu orang saksi maka dianggap alat bukti tersebut kurang sempurna, sehingga minimal diperlukannya dua orang saksi.

³¹ Hari Sasongko dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung. Mandar Maju. Hlm. 20.

- d. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”.

- e. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Prinsip ini diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Menurut prinsip ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.

Point penting mengapa penulis memuat Prinsip pembuktian perkara pidana ini dalam tinjauan pustaka yaitu untuk mengetahui dan memahami batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan terkait saksi yang sah secara hukum yang dapat dijadikan atau digunakan sebagai alat bukti dalam

pembuktian tindak pidana yang nantinya akan menjelaskan keterhubungan antara fakta dan peristiwa yang terjadi. Selain itu prinsip pembuktian tindak pidana ini akan digunakan sebagai alat pembanding dalam kajian pembahasan skripsi ini tentang konsep penerapan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

4. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.³²

Berdasarkan beberapa teori pembuktian yang telah diuraikan diatas, yang diterapkan di Indonesia dan dijadikan sebagai sistem pembuktian dalam perkara pidana yaitu sebagaimana diuraikan dalam KUHAP Pasal 183 KUHAP yang rumusannya adalah sebagai berikut : ” Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari rumusan Pasal 183 tersebut, dapat diketahui bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Tidak ada

³² Adhami Chazawi, 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. Alumni. Hlm. 24

yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.

Berdasarkan penjelasan Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan bahwa Pembentuk Undang Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* (sistem pembuktian yang hanya bersandar atas keyakinan hakim) dengan sistem *positief wettelijk stelsel* (pembuktian menurut undang-undang secara positif).

Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut hampir identik dengan ketentuan dalam Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Aktualisasi dari kombinasi kedua konsep dalam ketentuan pasal 183 KUHPA tersebut dapat dilihat dalam rumusan kalimat baku setiap diktum putusan perkara pidana yang menyatakan “secara sah dan meyakinkan”. Kata “sah” dalam hal ini berarti bahwa hakim dalam memberikan putusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHPA dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kata “meyakinkan” dalam hal ini berarti bahwa dari alat bukti yang sah tersebut maka terbentuk keyakinan hakim.

Rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil. Dengan tercapainya kebenaran materiil maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Karena kajian dalam penelitian skripsi ini membahas mengenai pengaturan keberadaan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana korupsi, maka penulis merasa perlu untuk menguraikan mengenai sistem pembuktian apa yang berlaku di Indonesia saat ini sehingga nantinya lebih mempermudah penulis dalam memberikan analisa yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Beban Pembuktian

Konsekuensi logis sistem hukum pembuktian tersebut berkorelasi dengan eksistensi terhadap asas beban pembuktian. Dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori tentang beban

pembuktian, yaitu beban pembuktian pada penuntut umum, beban pembuktian pada terdakwa, dan beban pembuktian berimbang.³³

a. Beban pembuktian pada penuntut umum

Teori beban pembuktian ini menegaskan bahwa penuntut umum lah yang harus membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat-alat bukti sah yang dihadapkan di persidangan guna untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa. Beban pembuktian ini berhubungan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dan merupakan aktualisasi dari asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non self incrimination*).

b. Beban pembuktian pada terdakwa

Berdasarkan teori ini terdakwa sendiri lah yang membuktikan dirinya tidak bersalah dalam suatu perkara pidana pada suatu persidangan. Pada beban pembuktian ini terdakwa sangat berperan aktif untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan menyiapkan segala pembuktian di depan sidang pengadilan. Implikasi dari teori beban pembuktian ini adalah apabila terdakwa tidak dapat membuktikan ketidakbersalahan dirinya maka oleh pengadilan terdakwa dinyatakan bersalah. Teori beban pembuktian ini dinamakan dengan teori beban pembuktian terbalik.

c. Beban pembuktian berimbang

Berdasarkan teori beban pembuktian ini penuntut umum maupun terdakwa dan/atau penasehat hukumnya saling membuktikan di depan persidangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka beban pembuktian yang diatur dalam KUHAP adalah beban pembuktian pada penuntut umum dan terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan. Sehingga kaitannya dengan penulisan ini adalah digunakannya seorang saksi yang juga merupakan seorang terdakwa pada berkas yang terpisah tidak sesuai dengan beban pembuktian yang telah diatur dalam KUHAP.

³³ Djoko Sumaryanto, 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Jakarta. Prestasi Pustaka. Hlm. 89-90.

B. Tinjauan Umum Tentang Saksi

1. Pengertian Saksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia saksi adalah orang yang melihat dan mengetahui sendiri suatu peristiwa, atau orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu pidana yang didengarnya, dilihat, atau dialaminya sendiri.³⁴

Secara umum pengertian saksi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), di atur dalam Pasal 1 angka 26 KUHP. saksi yaitu “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Pasal 1 angka 1 yaitu “Saksi yaitu orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan tentang hal-hal yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri atau ia ketahui yang berkenaan dengan suatu tindak pidana.”

Pengertian saksi itu sendiri tidak ubahnya definisi hukum, masih banyak yang mengartikan dari berbagai sudut keilmuan namun berdasarkan pemaparan tersebut diatas, diketahui bahwa syarat-syarat seseorang dapat dikatakan sebagai saksi yakni:

³⁴ Kamus Pusat Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Hal. 1246

- a. Orang yang melihat atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri suatu tindak pidana.
- b. Orang yang mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana
- c. Orang yang mengalami sendiri dan atau orang yang langsung menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana.

2. Jenis-Jenis Saksi

Adapun jenis-jenis saksi dalam sistem KUHAP yaitu saksi *a charge*, saksi *a de charge*, saksi ahli, dan saksi mahkota.³⁵

a. Saksi *A Charge* (memberatkan terdakwa)

Saksi ini merupakan saksi yang memberatkan tersangka atau terdakwa, dimana keterangannya menguatkan tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa. Saksi yang memberatkan ini biasanya diajukan oleh jaksa penuntut umum dan dicantumkan dalam surat dakwaannya, hal ini dilakukan oleh jaksa penuntut umum karena dalam persidangan dia harus dapat membuktikan akan segala sesuatu hal yang ia tuntutan dari si pelaku tindak pidana tersebut.

b. Saksi *A de Charge* (meringankan terdakwa)

Saksi *A de Charge* adalah saksi yang meringankan bagi tersangka atau terdakwa, atau saksi yang tidak menguatkan bahwa tersangka atau terdakwa itu melakukan tindak pidana. Saksi yang meringankan ini biasanya diajukan oleh tersangka atau terdakwa atau penasihat hukum

³⁵ H.P. Panggabean, *Op.Cit.* Hlm.87.

pada waktu sidang pengadilan. Pasal 65 KUHP menyebutkan bahwa Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya”.

c. Saksi Ahli

Pasal 1 butir 28 KUHP, bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Mengenai keterangan ahli ini diatur dalam KUHP pada Pasal 184 ayat (1) butir b dan keterangan ahli ini merupakan alat bukti tersendiri dalam hukum acara pidana. Keterangan ahli di dalam praktek di persidangan dapat diberikan secara langsung maksudnya ahli yang bersangkutan secara langsung memberikan keterangan dipersidangan atas permintaan hakim atau jaksa penuntut umum.

d. Saksi Mahkota (*Kroon Geterige = Witness Croal*)

Dalam praktik peradilan dikenal adanya saksi mahkota yakni saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa yang kepadanya diberi mahkota.

3. Saksi Mahkota

Istilah saksi mahkota ini tidak terdapat definisi otentik dalam KUHAP. Adapun beberapa pendapat ahli seperti Loebby Loqman menyebutkan bahwa saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa,

yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.³⁶ Sejalan dengan itu, Syaiful Bahkri, menjelaskan bahwa pada hakikatnya saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa yang kepadanya diberikan suatu mahkota.³⁷ Andi Hamzah mengemukakan definisi atau pengertian dari saksi mahkota adalah seorang terdakwa (biasanya yang paling ringan kesalahannya) dijadikan (dilantik) menjadi saksi, dan diberi mahkota, yang tidak akan dijadikan terdakwa lagi.³⁸

Kemudian istilah saksi mahkota ini juga dapat ditemukan definisinya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan:³⁹

“Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota”. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa adalah dalam bentuk ditiadakannya penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Prof. DR. Loebby Loqman, S.H., M.H., dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Saksi mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.

Selanjutnya tentang “saksi mahkota” sebagai alat bukti dalam perkara pidana juga dapat dijumpai dalam Yurisprudensi melalui Putusan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Syaiful Bakhri, 2009. *Pidana Denda dan Korupsi*. Yogyakarta. Total Media. Hlm.66

³⁸ Andi Hamzah, 2007. *Hukum Acara Pidana*. Edisi Kedua. Dalam Indriyanto Seno Adji. Hlm.15

³⁹ Hukum Online. *Definisi Saksi Mahkota*. [Http://www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Akses 13 Oktober 2017

Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.

Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa:⁴⁰

Mahkamah Agung tidak melarang apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan “saksi” di persidangan yang mana saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa dengan syarat bahwa saksi tersebut tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian.

Selain dalam Putusan Mahkamah Agung, Saksi Mahkota juga dikenal penggunaannya dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, yang menyatakan:⁴¹

Dalam praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (*deelneming*), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya, hanya berlaku untuk dirinya sendiri, oleh karena itu dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (*splitsing*), agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa Yurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi Mahkota sebagai alat bukti, misalnya Putusan Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1 989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian. Satu-satunya putusan Pengadilan yang menolak saksi mahkota sebagai alat bukti adalah Putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan Marsinah, yang menyatakan “saksi mahkota bertentangan dengan hukum” (Putusan Mahkamah Agung No. 1174K/Pid/1994, 381K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994). Untuk

⁴⁰ Setiyono, 2007. *Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*. Lex Jurnalica Vol. 5 No.1. Hlm. 30.

⁴¹ Kejaksaan Agung RI. Surat Edaran No. B-69/E/02/1997. Perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Diakses pada <https://kejaksaan.go.id/>. 21 September 2017.

mengantisipasi kemungkinan adanya hakim yang menjadikan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan terhadap Marsinah tersebut sebagai dasar putusannya, maka dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain.”

Berdasarkan definisi yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Kejaksaan Agung serta beberapa pendapat para ahli tersebut maka dapat diketahui bahwa saksi mahkota adalah saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang sama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana saksi tersebut diberikan mahkota atau lebih mudahnya bahwa saksi mahkota adalah seorang terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang kedudukannya sebagai terdakwa dilepaskan atau biasa juga disebut (terdakwa yang mengkhianati temannya). Saksi mahkota ini dimungkinkan di dalam praktik selama memenuhi syarat-syarat bahwa tindak pidana yang terjadi merupakan penyertaan, alat bukti yang ditemukan sangat minim sehingga menghambat jalannya acara pembuktian, dan telah diadakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*).

Dikarenakan skripsi ini membahas tentang keberadaan saksi mahkota maka penulis merasa perlu untuk menguraikan secara khusus dan detail mengenai pengertian dan jenis-jenis saksi dalam tinjauan pustaka ini agar dalam pembahasa penilitan ini tidak terjadi tumpang tindih pemahaman mengenai saksi secara umum dengan saksi mahkota.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Sebelum menguraikan mengenai pengertian korupsi, terlebih dahulu penulis akan menguraikan tentang tindak pidana. Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak menjelaskan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut.

Adapun menurut beberapa para ahli, seperti Moeljatno menerjemahkan *strafbaarfeit* adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.”⁴² Kemudian menurut Simons, *strafbaarfeit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁴³ Sehingga berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar aturan tersebut. Kemudian untuk dikatakan adanya perbuatan

⁴² Evi Hartanti, 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Kedua. Semarang. Sinar Grafika. Hlm. 6-7.

⁴³ *Ibid.* Hlm. 6

pidana maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam undang-undang dan bersifat melawan hukum.

Selanjutnya mengenai korupsi. Korupsi merupakan sebuah istilah yang cukup dikenal orang dimana – mana termasuk di Indonesia dan pada Tahun 1957 gejala sosial ini mendapat istilah resmi dalam hukum pidana. Mengawali deskripsi tentang pengertian atau istilah dari kata korupsi, penulis akan memulai dengan ungkapan yang pernah dikemukakan oleh Lord Acton dalam Dani Krisnawati, dkk sebagai berikut “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”, yang artinya kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut.

Kemudian ungkapan Lord Acton tersebut lebih diperkuat lagi dengan adanya 4 (empat) tipe korupsi sebagaimana yang dikemukakan oleh Piers Beirne and James Messerschmid yang mana keempat macam atau tipe perbuatan korupsi tersebut adalah sangat berkaitan erat dengan kekuasaan yaitu *Political Bribery* yang merupakan kekuasaan di bidang legislatif, *Political Kickbacks* yang merupakan kegiatan korupsi yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan pemborong, *Election Fraud* yang merupakan korupsi dalam kecurangan-kecurangan pelaksanaan pemilihan umum, dan *Corrupt Campaign Practice* yang merupakan korupsi dalam kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Kemudian dari bahasa latin inilah turun

kebanyak bahasa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*, Perancis yaitu *corruption*, dan Belanda yaitu *corruptie*.⁴⁴

Henry Campbell Black, mengartikan korupsi sebagai:⁴⁵

“an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others”.

terjemahan: sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain.

Termasuk pula dalam pengertian “*corruption*” menurut Black adalah, perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya.⁴⁶

Dalam *Webster’s New American Dictionary*,⁴⁷ kata “*corruption*” diartikan sebagai “*decay*” (Lapuk), “*contamination*” (kemasukan sesuatu yang merusak), dan “*impurity*” (tidak murni). Sedangkan kata “*corrupt*” dijelaskan sebagai “*to become rotten or putrid*” (menjadi busuk, lapuk atau buruk), juga “*to induce decay in something originally clean and sound*”

⁴⁴ Andi Hamzah, 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta. Rajagrafindo Persada. Hlm.4-6.

⁴⁵ Henry Compbell Black, *Black’s Law Dictionary With Pronounciations*, (St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1983), hlm. 182. Dikutip dalam Agustinus Pohan, Topo Santoso, Martin Moerings, 2012. *Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Denpasar. Tim PL. Hlm. 101.

⁴⁶ *Ibid*. Hlm. 101

⁴⁷ Lihat A. Mariam Webster, *New International Dictionary*, (G & C Marriam Co. Publishers Springfield Mass USA, 1985. Dikutip dalam Agustinus Pohan, Topo Santoso, Martin Moerings, 2012. *Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Denpasar. Tim PL. Hlm. 101.

(memasukkan sesuatu yang busuk, atau yang lapuk ke dalam sesuatu yang semula bersih dan bagus).

Sependapat dengan hal tersebut, A.I.N Kramer ST. menerjemahkan korupsi sebagai busuk, rusak atau dapat disuapi. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat, rusak atau suap.⁴⁸ Kemudian menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum, yang dimaksud dengan korupsi adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.⁴⁹

Kemudian Shed Husein Alatas dalam bukunya Sosiologi Hukum menjelaskan ciri-ciri korupsi, yaitu:⁵⁰

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya;
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum;
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat);
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.
- h. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;

⁴⁸ Darwan Prinst, 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 1.

⁴⁹ Eva Hertanti. *Op.Cit.*Hlm. 9

⁵⁰ *Ibid.* Hlm.11

- i. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya;
- j. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
- k. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlandung dibalik pembenaran hukum;
- l. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
- m. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat);
- n. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.

Tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi ini memiliki spesifikasi tertentu seperti adanya penyimpangan pada hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka secara langsung atau tidak langsung dimaksudkan untuk menekan seminimal mungkin kebocoran dan penyimpangan keuangan dan perekonomian negara.

Mengenai Tindak Pidana Korupsi ini diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara Yuridis Formal pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 serta Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Suatu perbuatan atau tindakan untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana mempunyai unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi.

Demikian halnya suatu tindak pidana untuk dikatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah:

- 1) Pasal 2 ayat (1) : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”
- 2) Pasal 3 : “Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Berdasarkan penjelasan para ahli hukum dan ketentuan undang-undang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui bahwa suatu tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi telah terpenuhi yaitu telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tersebut dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

2. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana korupsi dikenal juga dengan *extraordinary crime* karena dipandang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara serta pelaksanaan pembangunan nasional. Kriteria kejahatan luar biasa adalah meluas dan sukar pemberantasannya, persis korupsi di Indonesia. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengatasi adanya tindak pidana korupsi. Salah satu usaha tersebut adalah dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan anti korupsi (undang-undang khusus).

Adapun ciri-ciri agar suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai hukum pidana khusus yaitu menyimpang dari asas-asas yang diatur dalam undang-undang hukum pidana umum. Hukum pidana umum dibagi dua, yaitu formil dan materil. Sehingga hukum pidana khusus dapat memiliki dua macam penyimpangan, yaitu penyimpangan secara formil dan materil. Hukum pidana umum dari sudut materil mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan, peraturan umum dari sudut formil mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam hal ini maka berlaku adagium *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum).

Berdasarkan hal tersebut, disini penulis akan memaparkan kenapa tindak pidana korupsi dapat dikatakan sebagai tindak pidana khusus:

- a) Mengenai pengaturan tindak pidana

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu pada Pasal 15 dengan tegas menyatakan bahwa pidana bagi tindak pidana percobaan, pemufakatan jahat, dan pembantuan dipidana dengan pidana yang sama. Namun berbeda halnya dengan KUHP, pidana bagian delik percobaan adalah dikurangi sepertiga dari maksimum ancaman pidana, maka dalam undang-undang tindak pidana korupsi ketentuan demikian disimpangi. Pidana bagi delik percobaan sama dengan pidana bagi tindak-tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan selesai. Demikian juga dengan delik pembantuan pada Pasal 57 KUHP yang secara eksplisit menyatakan bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan yang dilakukan dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimum pidana pokok untuk pembantu adalah 15 (lima belas) tahun penjara.

Dengan demikian, maka dalam undang-undang tindak pidana korupsi hal tersebut tidak diikuti atau disimpangi.

b) Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dipandang sebagai subjek delik adalah manusia dan korporasi. Sedangkan dalam KUHP korporasi tidak diakui sebagai subjek delik, hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana. Ketentuan demikian disimpangi oleh undang-undang korupsi pada Pasal 1

ayat (3) secara eksplisit menyatakan bahwa “setiap orang” tidak hanya orang perorangan tetapi termasuk juga di dalamnya adalah korporasi. Sedangkan mengenai tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap suatu korporasi dan atau pengurusnya. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurusnya.

c) Sanksi

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur perumusan ancaman pidana secara kumulatif, kumulatif-alternatif, dan ancaman pidana minimum khusus. Ketentuan mengenai perumusan ancaman pidana tersebut tidak dikenal dalam KUHP, karena KUHP sendiri hanya mengenai dua sistem perumusan ancaman pidana yaitu sistem perumusan tunggal dan sistem perumusan alternatif.

d) Hukum pembuktian

Kegiatan pembuktian dalam tindak pidana korupsi disamping tetap menggunakan hukum pembuktian umum dalam KUHP, tetapi dalam bidang atau hal-hal tertentu berlaku pembuktian khusus sebagai perkecualiannya. Adapun hukum penyimpangan pembuktian yang ada dalam hukum pidana korupsi, terdapat pada 2 hal pokok, yaitu bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuktikan bukti petunjuk dan sistem beban pembuktian.

1) Bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk

Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP, alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui 3 (tiga) macam alat bukti, yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan terdakwa. Sedangkan menurut hukum pembuktian tindak pidana korupsi, bahan itu diperluas lagi, yakni pada Pasal 26 A Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menentukan bahwa alat bukti petunjuk juga dapat dibentuk dari 2 (dua) alat lain dari Pasal 188 ayat (2) KUHAP, yaitu:

- a. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, racangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, tampak bahwa sistem pembuktian negatif berdasarkan undang-undang yang terbatas (*negatief wettelijk*) yang tercermin dalam Pasal 183 KUHAP, dalam hukum acara pidana korupsi telah diperluas.

2) Sistem pembebanan pembuktian perkara korupsi

Sistem pembuktian mengacu pada ketentuan tentang standar dalam hal membuktikan sesuatu *in case* kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Seperti halnya

yang diatur dalam Pasal 183 KUHP bahwa sistem pembuktian yang dianut KUHP adalah sistem negatif (*negatief wettelijk*). Standar bukti untuk menyatakan terbuktinya kesalahan terdakwa, ialah harus ada atau berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dan dari 2 (dua) alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terjadinya tindak pidana. Sedangkan sistem pembebanan pembuktian mengacu pada pihak mana yang diberikan beban atau kewajiban untuk membuktikan dan hal apa saja yang harus dibuktikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka kekhususan dalam hukum acara pidana korupsi lebih mengacu pada sistem pembebanan pembuktian. Di dalam sistem pembebanan pembuktian yang khusus dan lain dari hukum pembuktian umum, disamping memuat ketentuan pihak mana (jaksa penuntut umum atau terdakwa) yang dibebani untuk membuktikan, memuat pula berbagai ketentuan, antara lain:⁵¹

- a. Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa beban pembuktian pada jaksa penuntut umum atau penasihat hukum atau kedua-duanya dalam hal korupsi, suap, menerima gratifikasi, jika nilainya Rp 10 juta, dan bila kurang dari Rp 10 juta beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum.
- b. Pasal 38B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, seperti pada sistem pembuktian terbalik, untuk membuktikan mengenai harta benda yang belum didakwakan, terdakwa wajib membuktikan bukan hasil korupsi, ditujukan untuk

⁵¹ Adami Chazawi, 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. PT.Alumni. Hal. 110-111.

menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana perampasan barang terhadap harta yang belum didakwakan.

- c. Walaupun hanya sedikit, hukum pembuktian khusus korupsi juga memuat tentang tata cara membuktikan. Seperti pada sistem pembuktian semi terbalik mengenai harta benda yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara korupsi yang didakwakan. Berdasarkan Pasal 37A ayat (2) dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membuktikan bahwa kekayaannya, kekayaan istri atau suaminya atau anaknya yang sesuai dengan sumber penghasilannya atau sumber kekayaan itu.

Berdasarkan pemaparan di atas, tindak pidana korupsi dikatakan sebagai tindak pidana khusus karena tindak pidana korupsi tergolong sebagai *extra ordinary crime* atau dengan kata lain sukar untuk diberantas. Mengingat tindak pidana korupsi ini dilakukan secara sistematis dan terencana oleh oknum-oknum tertentu yang memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi. Selain itu tindak pidana korupsi dikatakan sebagai tindak pidana khusus karena diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 yang mana beberapa pengaturan yang termuat di dalam Undang-Undang tersebut menyimpangi dari aturan-aturan mengenai korupsi yang terdapat dalam hukum pidana umumnya yaitu di dalam KUHP dan KUHAP. Selain itu hukum pembuktian di dalam tindak pidana korupsi terbagi atas 3 (tiga) sistem yaitu sistem pembuktian terbalik, sistem biasa, dan sistem semi terbalik atau berimbang sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B.

Tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi ini diuraikan secara lengkap dalam tinjauan pustaka karena kajian dalam skripsi ini ditinjau

dari prespektif hukum tindak pidana korupsi, sehingga sepatutnya penulis terlebih dahulu menguraikan secara komprehensif mengenai konsep penanganan dan penyelesaian perkara Tipikor agar penulis mengetahui dan memahami substansi permasalahan dalam penelitian ini.

D. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Hak Asasi Manusia

Istilah Hak Asasi Manusia atau *Human Right* merupakan suatu istilah yang tidak asing didengar sejak perang dunia II. Dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hak Asasi Manusia yang merupakan sebuah alat atau perangkat-perangkat mengenai hak yang menempel dan menyatu pada manusia sebagai hakikat makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Didalam Hak Asasi Manusia ini terdapat hakikat-hakikat kemanusiaan yang tidak dapat dilanggar dan harus dihormati dan diahrgai. Karen Hak Asasi Manusia ini bersifat mutlak yang merupakan kehormatan pada manusia dan harus mendapat perlindungan atas harkat dan martabat tersebut.

Adapun Hak Asasi Manusia menurut John Locke Hak Asasi Manusia adalah Keadaan alamiah, manusia telah mempunyai hak-hak alamiah yang melekat pada dirinya yaitu hak-hak asasi manusia yang dimilikinya secara pribadi yaitu: hak akan hidup, hak akan kebebasan atau kemerdekaan dan hak memiliki dan di miliki.⁵²

2. Dasar Hukum Pengatura Hak Asasi Manusia

⁵² Fajar. *Pengertian Hak Asasi Manusia*. <http://pengertian.website>. Akses 26 Oktober 2017.

Hak Asasi Manusia diakui oleh masyarakat dunia ditandai dengan munculnya *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia - DUHAM) oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948. Berdasarkan pasal 1 DUHAM disebutkan perlu adanya pengakuan, penghargaan sekaligus jaminan internasional bahwa setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka di karuniai akal dan budi dan kehendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Dengan adanya deklarasi tersebut mengartikan bahwa telah ada komitmen moral dunia internasional pada Hak Asasi Manusia sehingga setiap negara harus memberi jaminan Hak Asasi Manusia dalam konstitusi atau undang-undang dasarnya sebagai bentuk pemenuhan kewajiban internasional.

Hasil amandemen UUD NRI Tahun 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia dengan dibuatnya bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia yaitu pada Bab XA yang terdiri dari pasal 28A-J yang isinya kurang lebih mengenai jaminan Hak Asasi Manusia dan penegakan hukum untuk menjamin tegaknya HAM sebagai sebuah pilar negara hukum. Selain dengan perumusan Bab XA UUD NRI Tahun 1945, pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia juga diatur dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Baik Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 maupun Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 mempunyai arah tujuan yang sama yaitu terpenuhinya hak asasi manusia yang bukan tanpa batas. Demikian pula dalam pengaturan tentang Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu bahwa hak asasi manusia bukanlah sebebas-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang.

3. Pembagian Hak Asasi Manusia

Sebelum membahas mengenai pembatasan dari Hak Asasi Manusia, kiranya perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Hak Asasi Manusia terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *non-derogable rights* (hak yang tidak dapat dikurangi) dan *derogable rights* (hak yang dapat dikurangi).

a) *Non Derogable Rights* (Hak yang tidak dapat dikurangi)

Konsep dari *non-derogable rights* dimaknai bahwa beberapa HAM adalah bersifat mutlak yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara atau siapapun, dalam keadaan apapun bahkan dalam keadaan darurat sekalipun. Menurut Ifdal Kasim, berdasarkan *International Covenant on Civil and Political Rights* sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, kategori hak-hak yang tidak dapat dikurangi dan dapat dikurangi antara lain :

1) *Non Derogable Rights* (Hak yang tidak dapat dikurangi)

- a. Hak atas hidup (*rights to life*);
- b. Hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*);

- c. Hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*);
- d. Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang);
- e. Hak bebas dari pembedaan yang berlaku surut;
- f. Hak sebagai subyek hukum; dan
- g. Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama

2) *Derogable Rights* (Hak yang dapat dikurangi)

- a. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai;
- b. Hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan
- c. Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik lisan maupun tulisan).

Dengan adanya konsep *non derogable rights* dan *derogable rights* tersebut peran negara menjadi sangat penting, yaitu boleh atau tidaknya negara melakukan campur tangan dalam pemenuhannya, artinya terhadap beberapa hak secara absolut tidak diperbolehkan adanya campur tangan, namun terhadap beberapa hak lainnya masih memungkinkan adanya campur tangan negara dalam batas tertentu.

Pengurangan (pembatasan hak) tersebut hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang akan muncul dan tidak bersifat diskriminatif. Alasan-alasan yang dimungkinkan untuk melakukan

pembatasan diatur dalam beberapa peraturan baik nasional maupun internasional, yaitu pada pasal 29 ayat (2) DUHAM, Pasal 12 ayat (3) ICCPR, Pasal 70 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

4. Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu *Non Self Incrimination* terhadap Tersangka atau Terdakwa

Declaration of Human Right dalam Pasal 6 menentukan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.⁵³ Sehingga semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut. Demikian pula *International Covenant on Civil and Political Right* dalam Pasal 14 ayat 1 menyatakan “Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan”.⁵⁴ Demikian juga halnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam pasal 3 ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang sama di depan hukum”. Jadi dalam suatu proses peradilan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum.

⁵³ Pusham UII. *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. [Http://www.pusham.uui.ac.id](http://www.pusham.uui.ac.id). Akses 21 September 2017.

⁵⁴ Hukum Online. *Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik*. [Http://www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Akses 21 September 2017.

Apa yang dinyatakan deklarasi hak asasi manusia dan berbagai kovenan serta peraturan-peraturan lainnya tersebut merupakan konsep dari *Rule of Law*, yang menentukan adanya *Supremacy of Law*, *equality before the law*, and *the construction based on individual right*. Untuk melindungi martabat manusia termasuk mereka yang menjadi saksi, maka konsep *Rule of Law* ini harus dipegang teguh oleh mereka yang bertugas membentuk, melaksanakan, maupun mengawasi jalannya penerapan undang-undang.

Hukum acara pidana mengatur bagaimana negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan hak untuk mengenakan pidana, yang selaras dengan fungsinya sebagai suatu undang-undang acara pidana yaitu untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Sebagaimana terdapat dibidang hukum lainnya, dalam bidang hukum acara pidana juga terdapat asas-asas hukum. Asas ini merupakan titik tolak berpikir secara hukum yang mempunyai otoritas yang sering harus dipergunakan dimana peraturan-peraturan hukum tidak atau kurang mengatur suatu peristiwa. Asas-asas hukum dalam hukum acara pidana sebagaimana dalam bidang hukum lainnya mempunyai ciri khas yaitu keadilan. Jika tujuan dari hukum acara pidana ialah untuk mencari kebenaran, maka kebenaran ini harus dilakukan secara adil. Adil mencakup pengertian keseimbangan dalam mempertahankan kepentingan negara dan masyarakat atau undang-undang dan melindungi kepentingan individu.

KUHAP telah meletakkan jaminan dan perlindungan terhadap HAM, terutama terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana *The International Covenant On Civil and Political Right* (Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik) yang diterima dan disahkan oleh sidang umum PBB tanggal 16 Desember 1966, dapat digunakan untuk mengukur nilai KUHAP, yaitu jaminan dan perlindungan HAM yang terdapat dalam Pasal 9 dan terutama Pasal 14 ayat 2 dan 3 yang kemudian Indonesia meratifikasi kovenan internasional tersebut dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Covenant On Civil dan Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).⁵⁵

Selama ini saksi lebih dipandang sebagai alat bukti dan dibebani kewajiban untuk membantu pelaksanaan peradilan pidana. Proses peradilan pidana bertujuan memberikan keadilan atau hak dengan mempersamakan

⁵⁵ Pasal 14 ayat 2 : Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.

Pasal 14 ayat 3 : Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:

- (a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
- (b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
- (c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
- (d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan 5 / 17 untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;
- (e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
- (f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
- (g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.

semua orang dimuka hukum sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam KUHAP. Oleh karena itu saksi dalam kedudukannya sebagai pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana selain tersangka atau terdakwa mempunyai hak yang diberi perlindungan dan jaminan sebagaimana halnya dengan tersangka atau terdakwa. Tujuan utama adanya hak-hak saksi adalah untuk mengakui dan menjamin terhadap harkat dan martabat manusia. Pengakuan dan jaminan terhadap harkat dan martabat merupakan hak asasi manusia yang bersifat nasional, maupun bersifat universal atau internasional.

Salah satu jaminan dan perlindungan terhadap HAM tersangka atau terdakwa tersebut adalah *“not to be compelled to testify against himself or to confess guilt”* atau untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau dipaksa mengaku bersalah atau dikenal dengan *“non self incrimination”*. Asas *non self incrimination* adalah hak terdakwa untuk tidak mengkriminalkan atau menjerat dirinya sendiri dalam suatu kasus persidangan. Sejatinya tidak ada ketentuan hukum positif di Indonesia yang secara spesifik mengatur asas ini. Implisitas pengakuan adanya *“non self incrimination”* ini disebutkan melalui pasal 189 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri. Kemudian secara tegas asas mengenai *non self incrimination* ini diatur dalam artikel 14 Poin 3 yang menyatakan bahwa terdakwa tidak boleh dipaksa mengaku bersalah, maka berdasarkan hal tersebut seorang tidak dapat dipaksa bersaksi dan memberikan keterangan

bagi pemeriksaan atas dirinya termasuk hak untuk bebas dari paksaan untuk mengaku bersalah. Hal ini berarti terdakwa mempunyai hak untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri sejak proses penyidikan sampai proses persidangan di pengadilan. Selain itu menurut M. Yahya Harahap terdakwa berhak untuk memberi keterangan yang dianggap terdakwa paling menguntungkan baginya. Jadi, seorang terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, prinsip *non self incrimination* adalah hak terdakwa untuk tidak mengkriminalkan atau menjerat dirinya sendiri dalam suatu kasus persidangan. Pada dasarnya tidak ada ketentuan hukum di Indonesia yang secara spesifik mengatur asas *non self incrimination* ini, akan tetapi Pasal 66, 169 dan 175 KUHAP merupakan bentuk pasal yang merujuk pada asas tersebut, dimana dinyatakan bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Sehingga kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwa kedudukan tersangka atau terdakwa yang juga dijadikan sebagai seorang saksi pada berkas perkara yang di pisah akankah nantinya bertentangan dengan prinsip *non self incrimination* ini mengingat berdasarkan prinsip tersebut terdakwa tidak memiliki beban pembuktian dan terdakwa diberikan hak untuk tidak menjerat atau mengkriminalkan dirinya sendiri pada saat persidangan. Karena dalam penelitian skripsi ini terdapat indikasi pelanggaran HAM maka penulis memasukkan tinjauan umum Hak Asasi Manusia dalam tinjauan pustaka ini

agar lebih mudah dalam menganalisa apakah terdapat praktek pelanggaran HAM dalam penerapan Saksi Mahkota atau tidak.

E. Tinjauan Umum Tentang Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

1. Latar Belakang Perlunya Pembaharuan Hukum Pidana

Adapun latar belakang perlunya perubahan (penataan) dalam tubuh KUHP antara lain:⁵⁶

1. KUHP dianggap tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru.
2. KUHP kurang sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat.
3. KUHP kurang sesuai dengan perkembangan pemikiran/ide dan aspirasi tuntutan/kebutuhan masyarakat (nasional/internasional).
4. KUHP tidak merupakan sistem hukum pidana yang utuh, karena ada pasal-pasal/delik yang telah dicabut.

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia masa depan sesuai dengan sosio-politik, sosio filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*, Hlm. 14

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Penerbit PT.Citra Aditya Bakti. Hlm. 31

2. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia

Adapun urgensi pembaharuan hukum pidana yang dikemukakan oleh

Sudarto, yaitu : ⁵⁸

1. Alasan yang bersifat politik

Adalah wajar yang bahwa negara Republik Indonesia memiliki KUHP yang bersifat nasional, yang dihasilkan sendiri. Ini merupakan kebanggaan nasional yang inherent dengan kedudukan sebagai negara yang telah melepaskan diri dari penjajahan. Oleh karena itu tugas dari pembentukan undang-undang adalah menasionalkan semua peraturan perundang-undangan warisan kolonial, dan ini harus didasarkan kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

2. Alasan yang bersifat sosiologis

Urgensi pembentukan hukum (pembaharuan hukum pidana nasional) didasarkan pada keharusan, bahwa hukum nasional itu harus didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri. Hukum nasional haruslah mencerminkan kultur Indonesia. Suatu KUHP adalah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan suatu bangsa, karena ia memuat perbuatan-perbuatan itu suatu sanksi yang bersifat negatif berupa pidana. Ukuran untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang itu tentunya bergantung pada pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar dan sebaliknya.

3. Alasan yang bersifat praktis

Alasan ini mengisyaratkan, bahwa hukum nasional itu harus dapat dipahami oleh masyarakat sendiri. Alasan ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia secara resmi menggunakan bahasa Belanda, sementara dalam perkembangannya sangat sedikit masyarakat (termasuk penegak hukum) yang mempunyai kemampuan berbahasa Belanda.

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) di Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. ⁵⁹ Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial

⁵⁸ Tongat. *Op Cit.* Hlm. 25

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, 2009. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm. 29

yang pada umumnya telah usang dan tidak adil (*obsolete and unjustice*) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*) karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.

3. Pembaharuan Hukum Pidana Dalam RUU KUHP

Dalam Penjelasan Umum RUU KUHP juga ditegaskan bahwa Penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan atas landasan yang terkandung dalam konsideran RKUHP tersebut, reformulasi atas pengaturan hukum pidana yang dilakukan meliputi penentuan tindak pidana (kriminalisasi) yang sangat jauh berbeda dengan KUHP sekarang.

Tercatat ada 743 pasal dalam RKUHP dimana 513 di antaranya adalah pasal mengenai tindak pidana, selebihnya adalah pasal ketentuan umum. Jumlah rancangan pasal yang sedemikian besar terutama berkaitan dengan banyaknya pasal tentang tindak pidana dalam RKUHP ini menimbulkan berbagai reaksi dan sorotan yang mengkritisi bahwa RKUHP mempunyai gejala over criminalization. Konsep pemidanaan dan penetapan sanksi dalam RKUHP selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Adanya perubahan

yang cukup mendasar dari konsep awal sampai dengan konsep yang terakhir menunjukkan bahwa persoalan pemberian sanksi dalam RKUHP selalu disesuaikan dengan perkembangan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Barda Nawawi Arief dan Muladi (1997)⁶⁰ menyatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi.

Tinjauan pustaka tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang diuraikan dalam bab II ini dimaksudkan agar penulis memahami konsep pembaharuan pengaturan hukum pidana yang saat ini masih dalam proses perancangan dan pembahasan, sehingga nantinya penyusunan skripsi ini dapat sejalan dengan arah pembaharuan hukum acara pidana yang telah digagas oleh lembaga legislatif.

⁶⁰ *Op.Cit.*, Barda Nawawi Arief. Hlm. 30